

LAPORAN KINERJA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik dengan seperangkat indikator sasaran serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang diinginkan dan capaian kinerja yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk lebih meningkatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *good governance*.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan Kinerja di tahun mendatang.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana daerah
Kota Singkawang



EDI PRAWOKO, SH.

NIP. 19720408 199302 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas dan Fungsi BPBD.....	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	8
5. Sumber Daya Keuangan.....	10
6. Sarana dan Prasarana	11
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENSTRA	20
1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	26
1.1. Tujuan	
1.2. Sasaran Strategis	
1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
B. REALISASI ANGGARAN	45
BAB IV PENUTUP	46



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30), dan Peraturan Wali kota Singkawang Nomor 20 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya “Good Governance” yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 adalah Azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Berkenaan dengan hal tersebut arah pembangunan Kota Singkawang yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun kemasyarakatan senantiasa menyesuaikan dengan kebijakan yang telah digariskan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dengan tetap mengutamakan kepentingan atau aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam mengimplementasikan hal dimaksud, arah pembangunan Pemerintahan Kota Singkawang telah dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah yang spesifikasinya dijabarkan ke dalam bentuk Rencana Startegis, sebagai bahan pertanggungjawaban eksekutif kepada legeslatif atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119), berpedomankan kepada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30), dan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

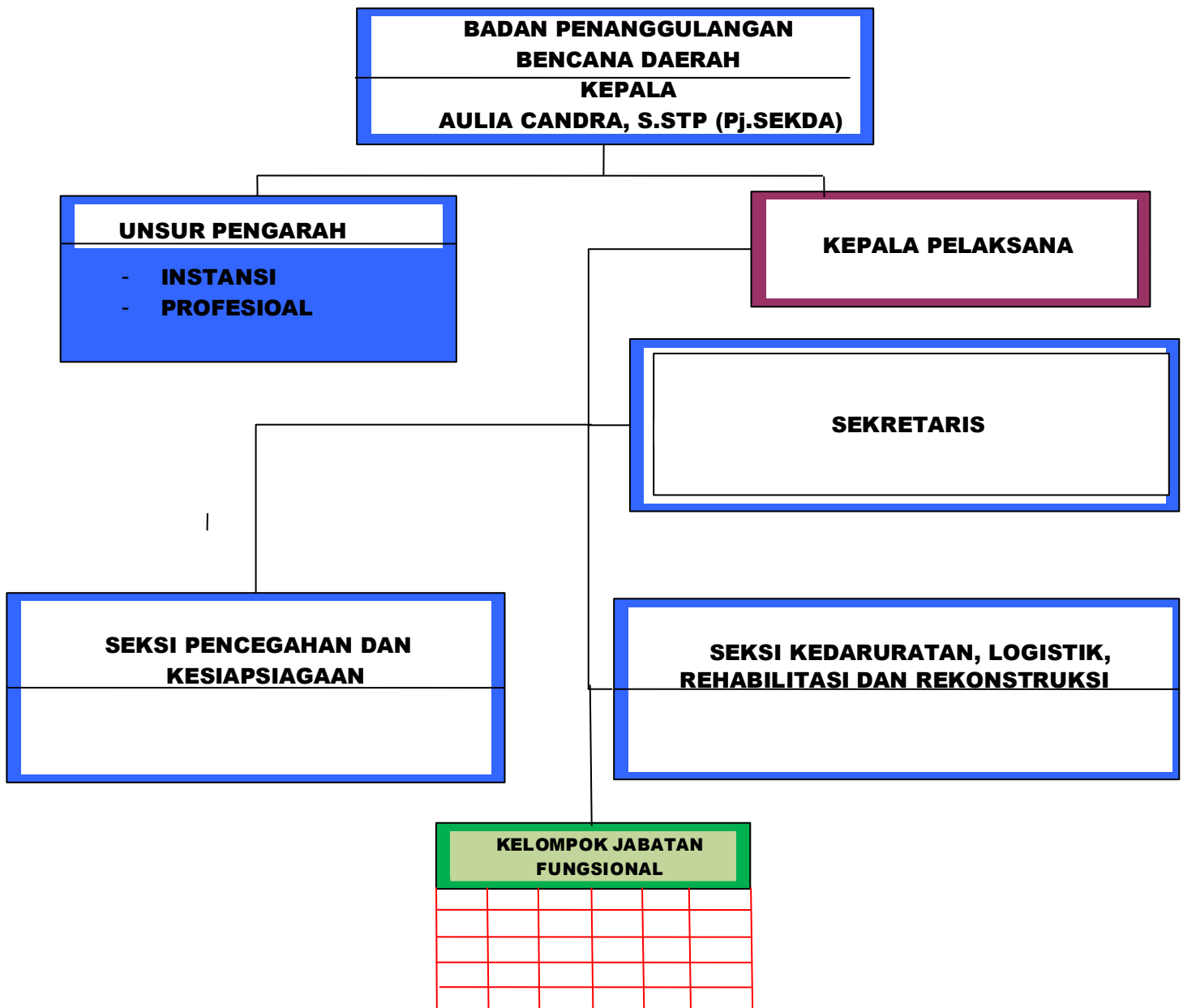
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah (Non Eselon)
3. Kepala Pelaksana (Eselon III/a)
4. Sekretaris (Eselon IV/a)
5. Kepala Seksi (Eselon IV/a), terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan



b. Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:





3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat urusan Kebencanaan. Adapun tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Eselon II/a) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Singkawang.

b. Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah (Non Eselon)

Unsur pengarah dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang berasal dari :

1. Lembaga/instansi terkait Pemerintah Daerah yakni dari Badan/Dinas terkait dengan Penanggulangan Bencana sebanyak 5 (lima) orang.
2. Masyarakat professional yakni pakar, professional dan tokoh masyarakat didaerah sebanyak 4 (empat) orang.



Unsur pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugasnya, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Kepala Pelaksana (Eselon III/a)

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kepala BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

- d. Sekretaris (Eselon IV/a)

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatusahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,



peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;

c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;

Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana

e. Kepala Seksi (Eselon IV/a), terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada



prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

2. Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;



- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Singkawang, ketersediaan sumber daya aparatur/personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan factor penting yang harus dipenuhi.

Dari segi kualitas, dirasakn disiplin, kompetensi dan kemampuan personil masih belum sepenuhnya memadai. secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah 12 orang (PNS) menurut jenjang kepangkatan maupun golongan, sebagai berikut :



Tabel
TABEL 1.I
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR BPBD
BERDASARKAN TINGKAT PANGKAT /GOLONGAN

<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina Utama Muda	IV/c =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina Tk.I	IV/b =	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina	IV/a =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Tk. I	III/d =	4 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata	III/c =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Muda Tk.I	III/b =	0 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Muda	III/a =	4 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengatur Tk.I	II/d =	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengatur Muda Tk.I	II/c =	1 Orang

Sedangkan gambaran persebaran Sumber Daya Aparatur menurut jenis kelamin dan dibagi menurut jabatan serta bidang yang ada dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 1.2
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SLTP		SMU		D3		S1		S2	
		LK	P	LK	P	LK	P	LK	P	LK	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sekretariat	-	-	2		-	-	1	1	1	-
2.	Seksi PK	-	-	2		-	-	1	-	-	-
3.	Seksi KLRR	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
Jumlah		-	-	6	1	-	-	3	1	1	-

Sumber : Sekretariat BPBD, 31 Desember 2023



TABEL 1.3
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Bidang/Seksi	Kalak		Sekban		Kasi		Staf		Jumlah	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sekretariat	1	-	1	-	-	-	1	1	3	1
2.	Seksi PK	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-
3.	Seksi KLRR	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-

Sumber : Sekretariat BPBD, 31 Desember 2023

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Dan Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 25 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 oktober 2023 dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana setelah perubahan sebesar Rp.



3.311.165.362,- dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 3.050.843.847,- atau sebesar 92,14%.

Adapun alokasi belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023, dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini :

No.	Bagian/bidang/unit kerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Belanja Operasi	2.997.660.362,-	2,737,599.647,-	91,32
2.	Belanja Modal	313.505.000	313.244.200,-	99,92
J U M L A H		3.311.165.362,-	3.050.843.847,-	92,14

Dilihat dari data diatas Anggaran Belanja Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang terealisasi sebesar 91,32%, belanja Modal terealisasi sebesar 99,92%.

6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang memiliki gedung Kantor di Jln. Perumahan Sinka Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara, dalam kaitannya dengan operasional sarana dan prasarana penunjang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**DATA INVENTARIS PERALATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG TRIWULAN IV
(PENGADAAN HIBAH DARI BNPB) KEADAAN BULAN OKTOBER - DESEMBER 2023**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NO RANGKA/MESIN	NO POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.3.2.05.02.06.078	GENSET 10 KVA	Carol	-	-	1 unit	2012
	1.3.2.02.03.01.009	MESIN PERAHU 40 PK	Mercury	-	-	1 unit	2012
	1.3.2.02.03.01.009	PERAHU KARET Ukuran 8 ORANG	Silinger	-	-	1 unit	2012
	1.3.2.05.02.01.060	TENDA PENGUNGSI	Pabrikasi	-	-	3 set	2012
	1.3.2.05.02.06.078	VELBED	Pabrikasi	-	-	25 unit	2012
		LAMPU SENTER HID SEARCH LIGHT	Polarion	-	-	1 unit	2012
		HT	Icom IC V80	-	-	2 unit	2012
		LAMPU PENERANGAN (SOLAR CEL)	Elsol	-	-	5 unit	2012
		SOLAR HANDLE LAMP	Pabrikasi	-	-	12 unit	2012
		SSB	Icom AT 130	-	-	1 set	2012
		RIG	Icom IC 2200H	-	-	1 set	2012
		MESIN PERAHU 9 PK	Tohatsu	-	-	2 unit	2013



		PERAHU POLYETHELIN	Sea Frog	-	-	2 unit	2012
		MOBIL RESCUE	Ford DC XLS 4x4MT	MNBDMFF90CW152 662/P4 AT1060949	B 9998 PSC	1 unit	2013
		MOTOR TRAIL	Kawasaki KLX 150s	MH4LX150CDKP777 31/LX1 50CEPB9146	B 6464 PVQ	1 unit	2013
	-	MOTOR TRAIL	Kawasaki KLX 150G	MH4LX150GGJP212 84/LX1 50CEPV1050	B 6460 TQD	1 unit	2016
	-	MOTOR TRAIL	Kawasaki KLX 150G	MH4LX150GGJP212 91/LX1 50CEPV1061	B 6461 TQD	1 unit	2016
		MESIN POMPA APUNG	-	-	-	2 unit	2016
		MESIN POMPA KARHUTLA (UTAMA)	-	-	-	1 unit	2016
		FLEXIBLE TANK 1500 GALON (5,677 Ltr)	-	-	-	1 unit	2016
		PERAHU LIPAT 4,28M	Portabote	-	-	1 unit	2017
		PERAHU LIPAT 3,85M	Portabote	-	-	1 unit	2017
		MESIN POMPA KARHUTLA (MENENGAH)	-	-	-	1 unit	2017
		Mobil Truck Tangki	-	-	-	1 unit	2019



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan ditahun 2023 masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala antara lain sebagai berikut:

Hambatan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan kebijakan dan kelembagaan terkait kebencanaan.

Solusi terhadap permasalahan

- a. Penguatan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana skala Kota;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Penanggulangan Bencana;
- c. Melakukan evaluasi atas implementasi SPM dan SOP Kebencanaan serta regulasi pendukung Penanggulangan Bencana;
- d. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

2. Belum optimalnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu penanganan tematik kawasan rawan bencana.

Solusi terhadap permasalahan

Memaksimalkan perencanaan Penanggulangan Bencana berbasis analisis risiko secara terpadu dengan deliniasi kawasan didalam tata ruang Kota.



3. Belum optimalnya pengembangan sistim informasi kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 18 kabupaten/kota;
- b. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- c. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

4. Belum memadainya kapasitas Pendidikan dan pelatihan SDM Kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Belum memadainya ketersediaan peralatan dan logistic Kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan dalam efektivitas penanganan darurat bencana;



b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait Kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana.

7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terkait Kebencanaan untuk pemberdayaan masyarakat dipervakilan wilayah;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- b. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

A. RENSTRA

Rencana Strategis(Renstra)merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasr dan dibuat secara integral, efisiensi dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja, serta merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bnecana Daerah Kota Singkawang untuk periode Tahun 2023-2026.



Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Dalam kurun waktu 2023-2026 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan selama 4 (empat) tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan rencana Strategis, Tujuan dan sasaran serta rencana kerja yang terukur.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai empat tahun.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kota Singkawang adalah Menurunkan Resiko Bencana.

1.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana setiap



indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Untuk mewujudkan tujuan *diatas* maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan indikator yaitu Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

2. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan indikator yaitu Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap.

3. Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan indikator yaitu Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sebagai berikut :

1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah



1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang serta RPJMD Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang akan digunakan adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan	Nilai Sakip	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB
2	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	$\frac{\text{Jumlah Komunitas masyarakat yang dilatih}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada PRB}} \times 100\%$	100	100	100	100	100

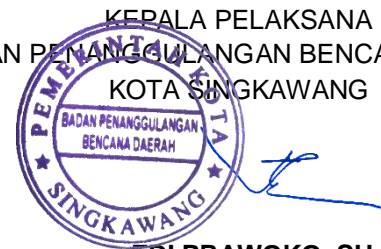


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap $\frac{\text{Jumlah Objek Terdampak Bencana Yg Ditangani}}{\text{Jumlah Keseluruhan Objek Yg Terdampak Bencana}}$	$\frac{\text{Jumlah Bencana Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Bencana Yang Terjadi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah objek yg terdampak bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah obyek yg terdampak bencana}} \times 100\%$	100	100	100	100	100

KERALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SINGKAWANG



EDI PRAWOKO, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19720408 199302 1 003



B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2023-2026, Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	$\frac{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat yang Dilatih}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada PRB}} \times 100\%$	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	$\frac{\text{Jumlah Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Bencana yang Terjadi}} \times 100\%$	100%
4	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Objek Terdampak Bencana Yg Ditangani}}{\text{Jumlah Keseluruhan Objek Yg Terdampak Bencana}} \times 100$	100%

NO	PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp.1.232.000.600,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.079.164.762,-
	Total	Rp.3.311.165.362,-

PIHAK KEDUA,
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG


Drs. H. SUMASTRO, M.Si

Singkawang, 16 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA BPBD
KOTA SINGKAWANG




EKI PRAWOKO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19720408 199302 1 003



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasarna/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan atau keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.



Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	100	100	100



2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	100	100	100
3.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	100	69,56	69,56
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	80

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	100	100%	100%



2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	100	100%	100%
3.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	100	69,56	69,56%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja keuangan	Kategori Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	80%

Sasaran 1; Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana

Indikator Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana tercapai dengan nilai rata-rata sasaran sebesar 89,97% dan dicapai melalui melalui indikator Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan membandingkan jumlah komunitas dari masyarakat yang diberikan pelatihan terhadap jumlah komunitas dari masyarakat pada Pengurangan Resiko Bencana.

Sasaran 2 ; Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif

Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif tercapai dengan nilai rata-rata sasaran sebesar 100% dan dicapai melalui melalui indikator Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap dengan membandingkan



Jumlah Bencana Yang Tertangani terhadap Jumlah Bencana Yang terjadi di Kota Singkawang.

Sasaran 3; Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana

Indikator Sasaran Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana tercapai dengan nilai rata-rata sasaran sebesar 69,56% dan dicapai melalui melalui indikator Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani dengan membandingkan Jumlah Objek Terdampak Bencana Yang Ditangani terhadap Jumlah Keseluruhan Objek Yang Terdampak Bencana.

Sasaran 4; *Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*

Sedangkan untuk Indikator Sasaran *Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah* tercapai dengan nilai rata-rata sasaran sebesar 100% dan dicapai melalui melalui 1 (satu) indikator antara lain sebagai berikut:

1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan indikator capain Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, target BB dan tercapai dengan Nilai 65,90 yang artinya belum tercapai

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan



efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya secara detail disajikan melalui tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.232.000.600	1.081.506.500	87,78 %	86,51 %	n/a
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif						
3.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana						
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.079.164.762	1.969.337.347	94,72%	80%	n/a



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang didukung dengan alokasi total anggaran sebesar Rp.3.311.165.362,- dan terealisasinya anggaran sebesar Rp.3.050.843.847,- yang dijabarkan dalam 2 (dua) program dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.079.164.762,-	1.969.337.347,-	94,72
2.	Program Penanggulangan Bencana	1.232.000.600,-	1.081506.500,-	87,78

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2026
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	89,97	89,97	100%	100%



2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	50,13	57,58	100%	100
3.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	95,73	95,73	69,56%	100
4.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	n.a	BB

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari capaian kinerja untuk dua tahun terakhir dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran 1, Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tahun 2022 sebesar 89,97 % mengalami peningkatan sebesar 100% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya resiko tentang bencana.

Sasaran 2, Meningkatkan Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif

Capaian indikator kinerja Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100% yang dikarenakan banyaknya terjadi bencana alam di Kota Singkawang sehingga personil BPBD dan Relawan BPBD bersama sama membantu warga yang tertimpa musibah.



Sasaran 3, Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana

Capaian indikator kinerja Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani pada tahun 2023 sebesar 69,56% mengalami penurunan dari tahun 2022 dikarenakan hanya dilaksanakan kegiatan konsultasi dalam penanganan pasca bencana tidak pada kegiatan fisik,

Sasaran 4, Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah di Tahun 2022 mengalami kemajuan yg mana awalnya hanya mendapat nilai CC sekarang menjadi B .

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Realisasi Kinerja dan Target Nasional 2023

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	100 %	
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	100%	
3.	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	69,56%	
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-
		38		



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian serta solusi yang diambil dalam sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan kebijakan dan kelembagaan terkait kebencanaan.

Solusi terhadap permasalahan

- a. Penguatan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana skala Kota;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Penanggulangan Bencana;
- c. Melakukan evaluasi atas implementasi SPM dan SOP Kebencanaan serta regulasi pendukung Penanggulangan Bencana;
- d. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.



2. Belum optimalnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu penanganan tematik kawasan rawan bencana.

Solusi terhadap permasalahan

Memaksimalkan perencanaan Penanggulangan Bencana berbasis analisis risiko secara terpadu dengan deliniasi kawasan didalam tata ruang Kota.

3. Belum optimalnya pengembangan sistim informasi kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 18 kabupaten/kota;
- b. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- c. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

4. Belum memadainya kapasitas Pendidikan dan pelatihan SDM Kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah;



- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Belum memadainya ketersediaan peralatan dan logistik Kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan dalam efektivitas penanganan darurat bencana;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait Kebencanaan;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana.



7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terkait Kebencanaan untuk pemberdayaan masyarakat diperwakilan wilayah;

Solusi terhadap permasalahan

- a. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- b. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di lingkungan Pemerintah Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang menetapkan anggaran sebesar Rp. 3.311,165.362,00 dengan persentase capaian realisasi anggaran mencapai 91,25% atau sebesar Rp. 3.050.843.847,00. Realisasi capaian indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang pada umumnya meningkat, kemudian jika dilihat dari realisasi anggaran strategis terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 260.321.515,00 atau dengan persentase sebesar 7,86%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Selain itu Laporan Kinerja juga menjadi ukuran akan penilaian dan keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2023 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota



Singkawang terutama dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang menetapkan 4 (sasaran) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2023 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB dengan target sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%.
2. Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap dengan target sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%.
3. Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani dengan target sebesar 100% dan tercapai sebesar 69,56%.
4. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target BB dan capaian realisasi B.

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas masih terdapat indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja sudah tercapai secara optimal.